

BAB II

Sistem “*Comfort Women*” dan Perspektif Jepang dan Korea Selatan dalam Memandang Isu “*Comfort Women*”

Bab ini dimulai dengan menjelaskan sejarah okupasi dan asal-usul sistem “*comfort women*” Jepang di Korea. Bab ini juga menjelaskan secara umum mengenai bagaimana sistem “*comfort women*” berlangsung. Kemudian, bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana isu sejarah, terutama “*comfort women*” mempengaruhi perspektif Jepang dan Korea Selatan dalam memandang satu sama lain.

2.1 Okupasi dan Sejarah Sistem “*comfort women*” Jepang di Korea

Kemenangan Jepang dalam perang pertama Cina-Jepang(1894-1895) dan Russo-Jepang (1904-1905), merupakan momentum yang menjadikan Jepang sebagai kekuatan imperialis baru di Asia Timur dan semakin mendorong Jepang dalam melakukan ekspansi ke berbagai negara di Asia (Sang-Sook, 2011, hal. 3). Diawali sejak abad ke-19, Jepang yang berada dalam blok poros bersama Jerman dan Italia berusaha untuk mengejar ketinggalannya terhadap bangsa Barat dalam membangun koloninya sendiri, akan tetapi dengan ketertinggalannya dengan bangsa Eropa yang telah menguasai Afrika dan sebagian Asia saat itu, akan lebih mudah bagi Jepang untuk mewujudkan ambisinya dengan menguasai Asia Timur yang secara geografis dekat dengan Jepang (Hook *et al.*, 2005, hal. 81).

Jepang mewujudkan ambisinya tersebut melalui mekanisme imperialisme dan *the Greater East Asia Co-prosperity Sphere*. Bagi Jepang, *the Greater East*

Asia Co-prosperity Sphere merupakan salah satu elemen penting dalam pan-Asianism, yang beranggapan bahwa ekspansi imperialisme Jepang di kawasan penting adanya dalam rangka membebaskan Asia Timur dari sistem kolonial barat dan dapat berkembang di bawah perlindungan Jepang dalam semangat persaudaraan dan solidaritas (Hook *et al.*, 2005, hal. 149). Ilmuwan-ilmuwan Jepang, pebisnis, maupun petinggi militer Jepang telah didoktrin dengan prinsip *Greater East Asia Co-prosperity Sphere, hakko ichiu*, yaitu “Dunia dalam Satu Atap” dan kebijakan militeristik dalam ekspansi bersenjata (CIA, 1945). Dengan prinsip tersebut tentara militer Jepang berperang demi terwujudnya kekuasaan baru di Asia. Hal inilah yang kemudian mendorong invasi yang dilakukan militer Jepang di berbagai wilayah di Asia semakin intens dilakukan.

Tersebarinya tentara Jepang di berbagai wilayah jajahan Jepang, mendorong pemerintah Jepang untuk menciptakan sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang, dan sebagai tindakan pencegahan terhadap pemerkosaan dan penyakit menular seksual di kalangan tentara Jepang (Koh, 2007, hal. 11). Pemerintah Jepang menganggap “*comfort women*” sebagai sistem yang dapat menjawab permasalahan tentara Jepang tersebut. Selain itu, sistem “*comfort women*” juga dapat meningkatkan semangat tentara Jepang dalam bertempur dengan menghilangkan stress dan menyediakan “hiburan” diwaktu luang bagi para tentara (Koh, 2007, hal. 11).

Semenanjung Korea secara resmi menjadi bagian dari koloni Jepang pada tahun 1910, setelah sebelumnya Jepang telah menyatakan semenanjung Korea sebagai protektorat Jepang di tahun 1905 (Lew, 2000, hal. 23). Ketika pertama

kali datang, Jepang menyanggah prinsip *Naeseon Ilche* yang berarti Joseon dan Jepang merupakan satu kesatuan, akan tetapi prinsip ini ternyata dijalankan hanya untuk menipu dan mengambil hati rakyat Korea, pada akhirnya Jepang menjadikan semenanjung Korea hanya sebagai objek dari kekaisaran Jepang, yang dimanfaatkan Jepang dalam mencapai tujuan nasional Jepang (Sang-Sook, 2011, hal. 46). Pemerintahan Jepang di semenanjung Korea didominasi oleh militer Jepang dengan *draconian system* yang merampas banyak hak warga sipil. Jepang mengeksploitasi sumber daya manusia maupun sumber daya alam Korea dalam memenuhi kebutuhan perang Jepang di Manchuria, Cina, dan Pasifik (Lew, 2000, hal. 23)

Pada awal tahun 1931 Jepang mulai membangun “*comfort station*” atau tempat dimana wanita-wanita yang telah direkrut Jepang sebagai “*comfort women*” “dipekerjakan” di berbagai daerah kekuasaannya, seperti Manchuria, Taiwan, Borneo, Rabaul, Ryuku, Filipina, Singapura, Burma, Indonesia, Malaya, Jepang, dan Korea (Arawa, 2013, hal. 177). “*Comfort station*” dibangun sendiri oleh militer Jepang, bahkan militer Jepang pula yang membentuk berbagai kebijakan, harga, struktur, jadwal dan menyediakan dokter untuk memeriksa wanita-wanita tersebut secara berkala dan memastikan mereka bebas dari penyakit menular seksual (Center for Research on Globalization, 2015). Meskipun berasal dari berbagai negara, akan tetapi diperkirakan hampir 80% dari “*comfort women*” berasal dari Korea (Arawa, 2013, hal. 178)

Wanita-wanita tersebut direkrut Jepang dengan berbagai cara. Pada awalnya memang wanita-wanita yang dikirim ke “*comfort station*” adalah

sukarelawan atau mereka yang pada dasarnya adalah pekerja seksual. Seiring berjalannya waktu dan permintaan akan wanita di “*comfort station*” yang semakin meningkat, pemerintah dan militer Jepang mulai melakukan cara-cara lain untuk dapat memenuhi permintaan tersebut. Wanita-wanita yang kemudian direkrut biasanya adalah mereka yang memiliki status ekonomi yang rendah dan dililit hutang, sehingga mereka ditipu dengan diiming-imingi akan diberikan pekerjaan yang menguntungkan. Mereka direkrut melalui agen yang ditunjuk secara langsung oleh Kepala Bagian Militer Jepang di Korea (AWF, 2003). Pekerjaan yang dijanjikan tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi biasanya berkaitan dengan pekerjaan sebagai pegawai pabrik, pelayan restoran, merawat para tentara di Rumah Sakit atau menghibur para tentara yang terlibat perang secara umum (AWF, 2003). Wanita-wanita yang kebanyakan masih sangat muda tersebut, kemudian dikumpulkan untuk dibawa menggunakan kapal, kereta, truk, atau pesawat udara angkatan militer Jepang ke berbagai “*comfort station*” yang tersebar di berbagai daerah kekuasaan Jepang (Koh, 2007, hal. 6). Pemerintah Jepang bahkan menerbitkan izin khusus bagi para wanita-wanita tersebut untuk dapat bepergian dan menetap di negara tujuan yang telah ditetapkan, sehingga mereka tidak lagi memerlukan paspor (Center for Research on Globalization, 2015).

Kondisi “*comfort station*” tempat wanita-wanita tersebut tinggal sangat memprihatinkan dan dikontrol secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah Jepang (Koh, 2007, hal. 6). “*comfort station*” biasanya hanya berupa gubuk kecil yang terdiri dari ruangan-ruangan sempit berukuran 3x5, yang berisi

tempat tidur (Koh, 2007, hal. 6). Di “*comfort station*” wanita-wanita yang telah didatangkan dari berbagai negara termasuk Korea, diperlakukan secara tidak manusiawi dan dianggap sebagai properti angkatan militer. Mereka diperkosa secara rutin, bahkan dalam beberapa kasus hingga 20 sampai 30 kali per hari, serta tidak diberikan akses terhadap air, makanan, dan fasilitas sanitasi yang layak (Park *et al.*, 2016, hal. 3). Ha Sun-nyo, salah seorang korban “*comfort women*” menceritakan pengalamannya ketika ia berusaha kabur dari salah satu “*comfort station*” (Orreil, 2008, hal. 140) :

“About one year had passed since I came to Shanghai when I stole away in the snow from the ianjo. When the rickshaw arrived at its last stop the night had already fallen. I had nowhere to run and I didn’t know the language, I hardly slept. I kept dozing in and out of sleep worrying someone would find me and force me to return to the ianjo. Before I knew it, it was dawn. The more I thought about it the more I realised that I had nowhere to run. So I decided to return. I crept back into the kitchen. I cooked some rice and sat down at the table when my manager screamed at me to stop eating. However, I did not stop. I continued eating while the manager beat me violently calling me an escape.”

Apabila militer Jepang berhasil menangkap beberapa dari mereka yang ingin melarikan diri atau bunuh diri, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat bahkan di ancam akan dilukai keluarganya (Park *et al.*, 2016, hal. 3).

Ketika Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945 dimana Jepang mengalami kekalahan penderitaan korban “*comfort women*” tidak lantas berakhir. Bagi Jepang, para korban “*comfort women*” yang masih bertahan, hanya menambah beban kekalahan perang Jepang, sehingga kebanyakan dari mereka justru dibunuh oleh militer Jepang atau ditelantarkan di daerah terpencil tanpa kepastian akan dipulangkan kembali ke negara asalnya (Koh, 2007, hal. 8). Sedikit dari mereka yang bisa kembali ke negara asalnya pun tetap menanggung

beban yang sama besarnya. Kebanyakan dari mereka kembali dengan mengalami cacat fisik akibat kekerasan yang dialami selama berada di “*comfort station*”, penyakit menular seksual, tidak dapat menikah dan akhirnya harus menjalani sisa hidup yang penuh kesengsaraan (AWF, 2003). Meskipun menanggung trauma yang amat berat, pada awalnya sangat sulit bagi para korban “*comfort women*” untuk dapat menceritakan segala penderitaan yang mereka alami sebagai “*comfort women*”, karena pengaruh budaya konfusianisme yang dianut oleh Korea (Koh, 2007, hal. 9). Budaya Konfusianisme menentang adanya interaksi intim antara pria dan wanita, serta mengutamakan kesucian seorang wanita (Mayness, 2012, hal. 15). Lee Young-Ok salah satu korban “*comfort women*” yang selamat dan berhasil kembali ke Korea Selatan menyatakan pengalamannya sebagai berikut (Mayness, 2012, hal. 16):

“At that time, a woman’s chastity was considered to be more important than her life. How could I tell people I was daily raped by many soldiers. It would have been a great humiliation to my parents. Many times I regretted I came back home alive. It would have been better for me to die there... Yet, looking back I am angry at the fact that because of traditional Korean customs I had to hide my past without myself doing anything wrong.”

Dapat dilihat, tidak hanya masyarakat luas akan tetapi keluarga korban “*comfort women*” sendiri tidak serta merta dapat menerima kepulangan mereka kembali. Beberapa keluarga percaya bahwa kehormatan mereka dapat tercemar jika menerima putri mereka kembali. Korban “*comfort women*” yang pada akhirnya berhasil menikah pun seringkali ditinggalkan ketika suami mereka telah mengetahui mengenai masa lalu mereka (Mayness, 2012, hal. 16).

2.2 Korea Selatan dan Jepang dalam Memandang Isu Sejarah

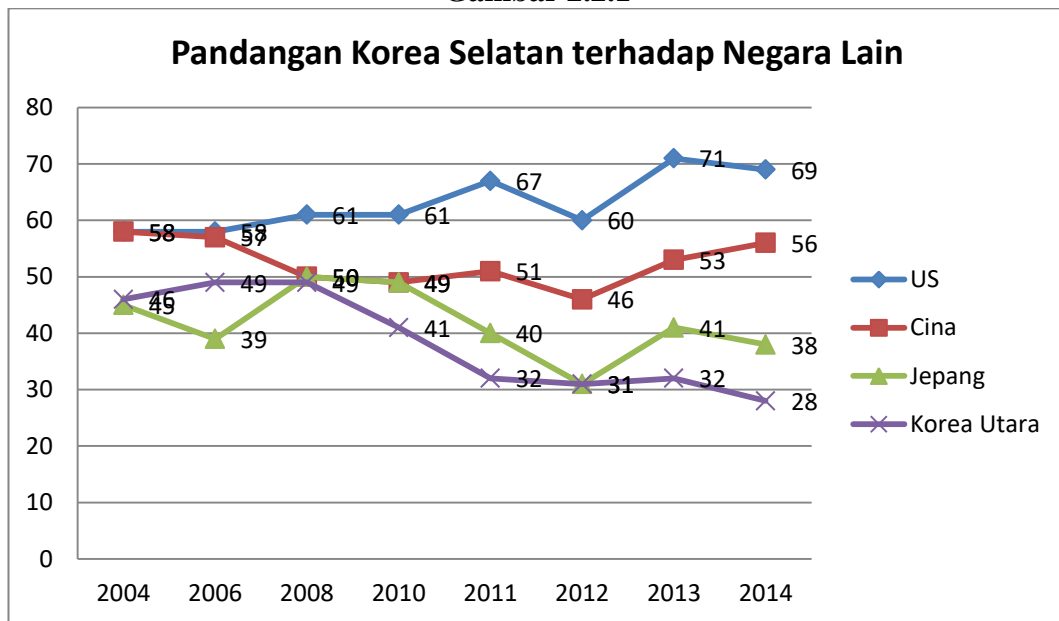
Okupasi Jepang di Korea selama kurang lebih 35 tahun meninggalkan luka yang cukup mendalam bagi rakyat Korea Selatan. Kedua negara telah mencoba melakukan rekonsiliasi dalam hubungan keduanya melalui perjanjian bilateral di tahun 1965, *The Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea* yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 22 Juni 1965. Perjanjian ini sebenarnya bertujuan untuk merestorasi hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan, akan tetapi pada kenyataannya perjanjian ini tidak menyelesaikan permasalahan sejarah antar kedua negara.

The Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea 1965 hanya terbatas pada isu properti dan ekonomi, tidak termasuk kerugian individu yang disebabkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jepang (Arakawa, 2013, hal. 189). Perjanjian yang seharusnya berfungsi untuk merestorasi hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan ini, tidak mencakup permintaan maaf yang tulus dari Jepang atas perbuatannya terhadap Korea Selatan pada masa penjajahan Jepang (Cho & Park, 2011, hal. 285). Provisi yang ditawarkan Jepang kepada Korea Selatan sebesar \$800 juta selama sepuluh tahun pun merupakan bagian dari persetujuan mengenai kerjasama ekonomi, bukan sebagai reparasi atas kesalahan Jepang di masa lalu (Cho & Park, 2011, hal. 285). Perjanjian ini memang lebih didorong oleh faktor ekonomi, bahkan dalam bahasa Jepang perjanjian ini disebut *yuchaku* sedangkan bahasa Korea *yuchak* yang secara harfiah berarti kolusi antara dua pemerintahan, dimana rezim Presiden Park Chung-hee yang memerintah Korea Selatan pada waktu itu membuat

kebijakan tersebut berdasarkan peluang kerjasama ekonomi yang ditawarkan pemerintah Jepang (Cho & Park, 2011, hal. 285). Hal inilah yang menyebabkan isu “*comfort women*” kerap kali naik, karena belum terselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi hambatan dalam hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan.

Saat ini, interaksi antara Jepang dan Korea Selatan memang semakin meningkat melalui hubungan bisnis, turisme, pertukaran pelajar, ataupun pernikahan, terutama dengan adanya persebaran budaya populer *Korean Wave*. Akan tetapi, dengan adanya peningkatan hubungan ini, justru menimbulkan adanya paradoks (Glosserman & Synder, 2015, hal. 7). Keterbukaan antar keduanya menimbulkan ekspektasi tinggi, bahwa ke dua negara dapat lebih memahami dan menghargai satu sama lain, akan tetapi ketika ini tidak terjadi, ketika salah satu negara justru melakukan hal yang menyinggung negara lainnya maka luka yang dialami pun akan lebih dalam (Glosserman & Synder, 2015, hal. 7).

Gambar 2.2.1

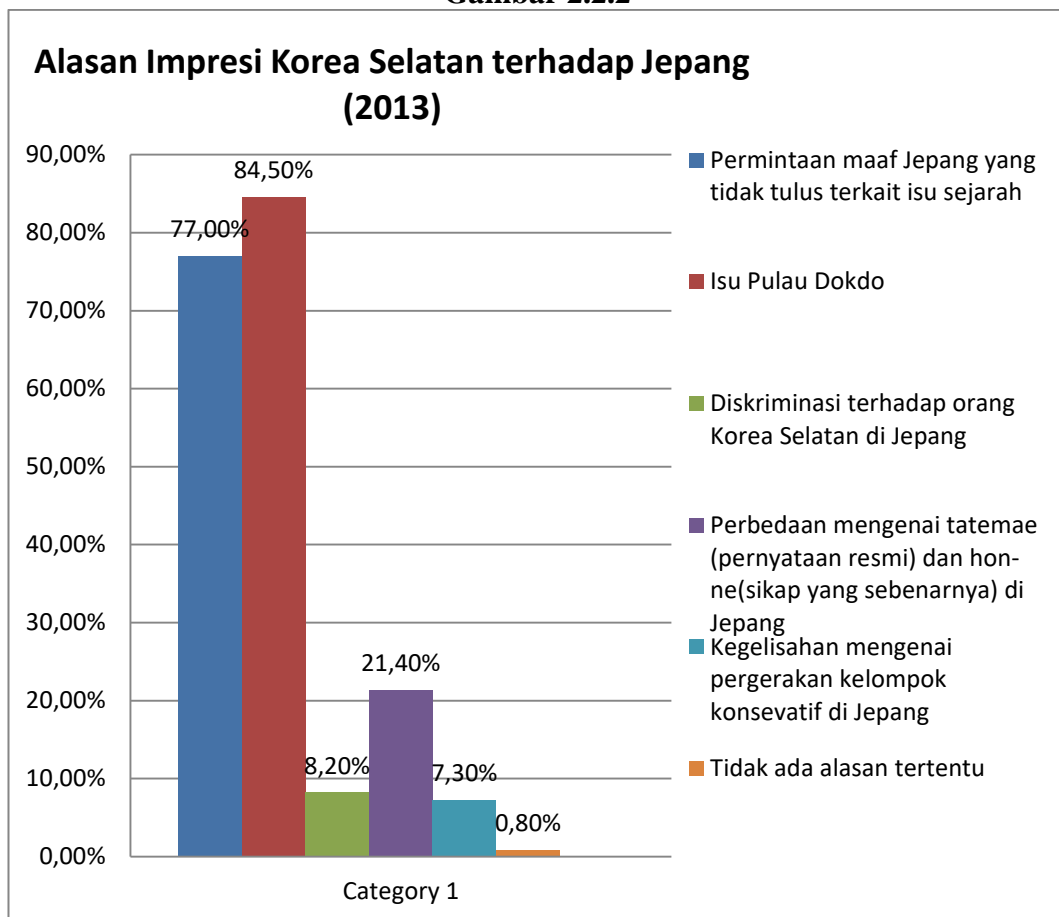


Sumber: EAI (2004;2006;2008), EAI. Han-Kook Research Company (2010-2014)

Gambar 2.2.1 menunjukkan survey yang dilakukan oleh *East Asia Institute* (EAI), dan *Han-Kook Research Company* di Korea Selatan, *Chicago Council on Global Affair* (CCGA) di Amerika Serikat, dan *Genron NPO* di Jepang. Skor dalam gambar ditujukan untuk mengetahui pandangan Korea Selatan terhadap negara lain dalam skala 0-100, dimana semakin mendekati 0 berarti pandangan Korea Selatan terhadap negara tersebut semakin negatif dan semakin mendekati 100 berarti semakin positif. Survey tersebut menunjukkan, bahwa pandangan Korea Selatan terhadap Jepang cenderung negatif setiap tahunnya, tidak pernah melebihi skor 50. Meskipun sempat membaik di tahun 2008, angka ini kembali menurun di tahun 2010 dan 2011 hingga mencapai titik terendahnya di tahun 2012, bahkan angka ini menyamai skor bagaimana Korea Selatan memandang Korea Utara, yang *notabene* intens berkonflik dengan Korea Selatan.

Penyebab utama pandangan negatif rakyat Korea Selatan terhadap Jepang ini terutama dikarenakan sentimen anti-Jepang yang tumbuh pada rakyat Korea Selatan karena berbagai konflik isu sensitif antara Jepang dan Korea Selatan, termasuk salah satunya isu “*comfort women*” (EAI, 2015). Hal ini senada dengan survey lain yang dilakukan Genron NPO sejak tahun 2013 dan 2014 mengenai alasan utama Korea Selatan memiliki pandangan yang negatif terhadap Jepang.

Gambar 2.2.2



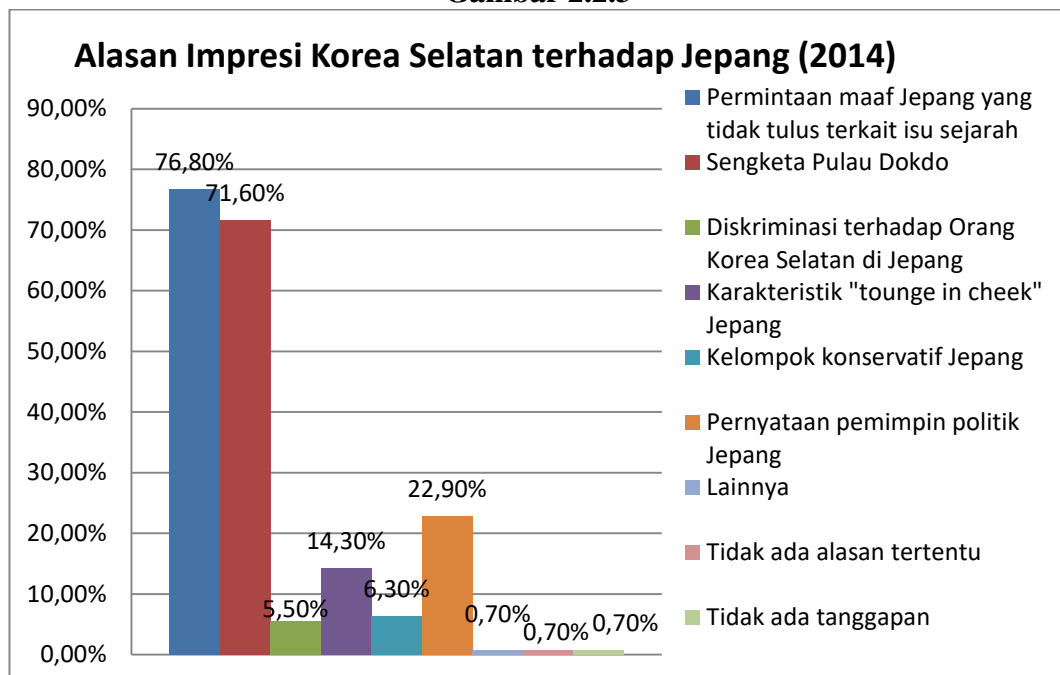
Sumber: *The 1st Japan-South Korea Joint Opinion Poll (The Genron NPO, 2013)*

Pada gambar 2.2.2 dapat dilihat bahwa salah satu penyebab utama pandangan negatif rakyat Korea Selatan terhadap Jepang adalah, karena adanya isu sejarah

yang belum terselesaikan antara Jepang dan Korea selatan yaitu sebesar 77%. Pada survey yang sama, respon rakyat Korea Selatan terhadap pertanyaan “apa yang terpikirkan pertama kali ketika mendengar kata Jepang?” 61,5% dari responden menyatakan isu mengenai “*comfort women*” (The Genron NPO, 2013).

Di tahun 2014, survey yang kembali di lakukan mengenai alasan pandangan negatif Korea Selatan terhadap Jepang menghasilkan *output* yang sama.

Gambar 2.2.3



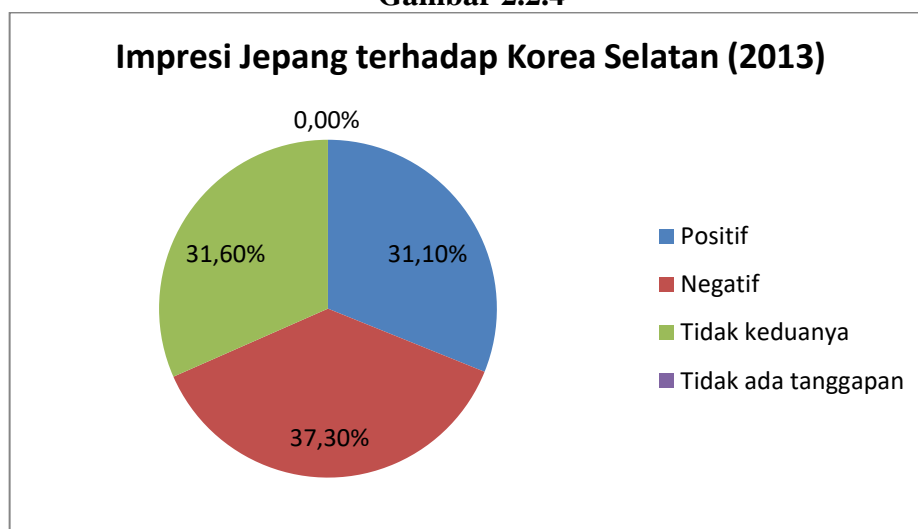
Sumber: *The 2nd Joint Korea-Japan Public Opinion Poll 2014 (The Genron NPO & EAI, 2014)*

Polling pada gambar 2.2.3 menyatakan bahwa isu sejarah yang belum terselesaikan dengan baik antara Jepang dan Korea Selatan menduduki presentase tertinggi alasan mengapa Korea Selatan memiliki impresi negatif terhadap Jepang yaitu sebesar 76,80%. Jawaban isu “*comfort women*” dari pertanyaan yang sama, yaitu “apa yang terpikirkan pertama kali ketika mendengar kata Jepang?” pun

masih memperoleh persentase yang tinggi yaitu sebesar 55,8% (The Genron NPO & EAI, 2014).

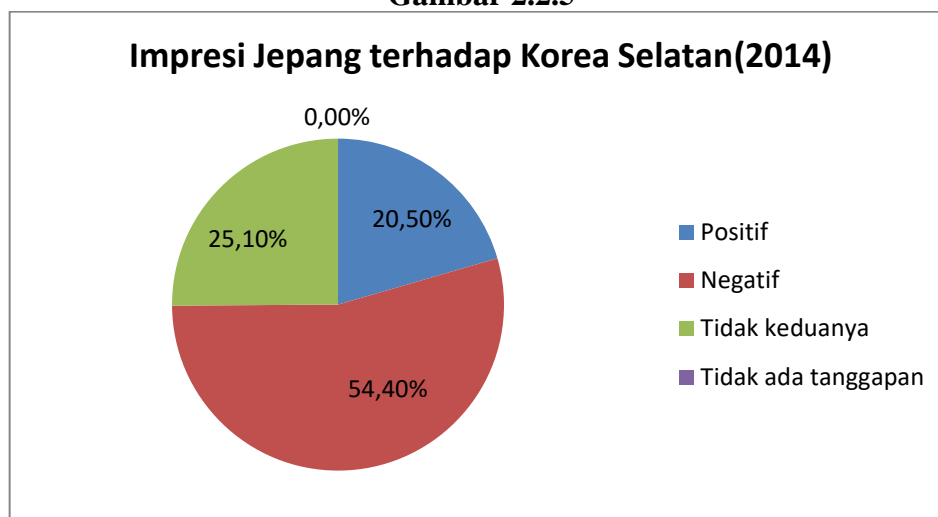
Di sisi lain survey yang sama juga dilakukan oleh organisasi non-profit the Genron NPO dan East Asia Institute di Jepang, mengenai bagaimana Jepang memandang Korea Selatan.

Gambar 2.2.4



Sumber: The 2nd Joint Korea-Japan Public Opinion Poll 2014 (The Genron NPO & EAI, 2013)

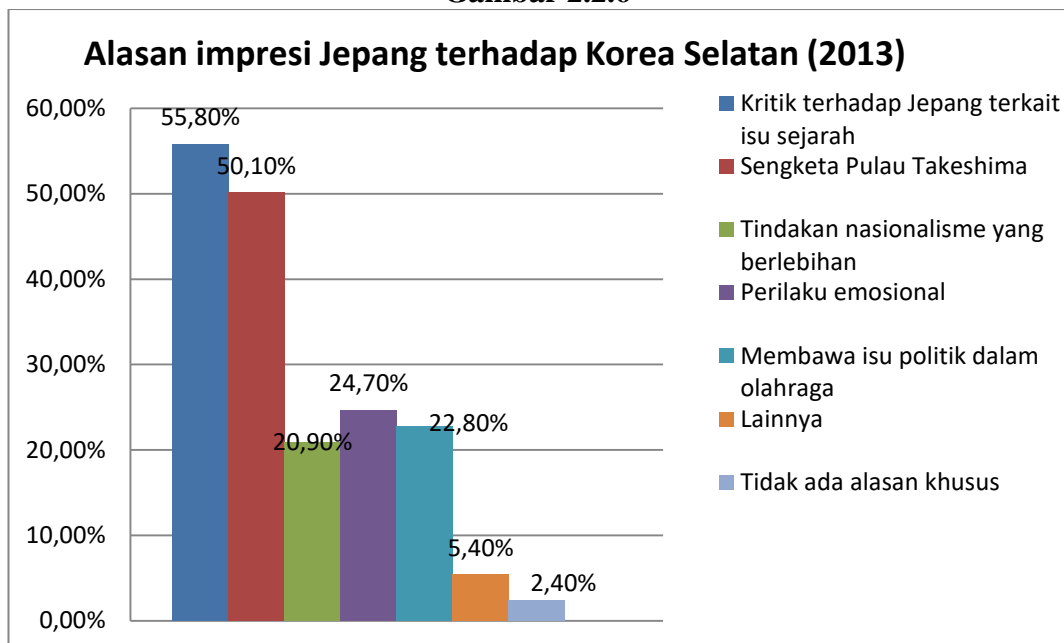
Gambar 2.2.5



Sumber: The 2nd Joint Korea-Japan Public Opinion Poll 2014 (The Genron NPO & EAI, 2014)

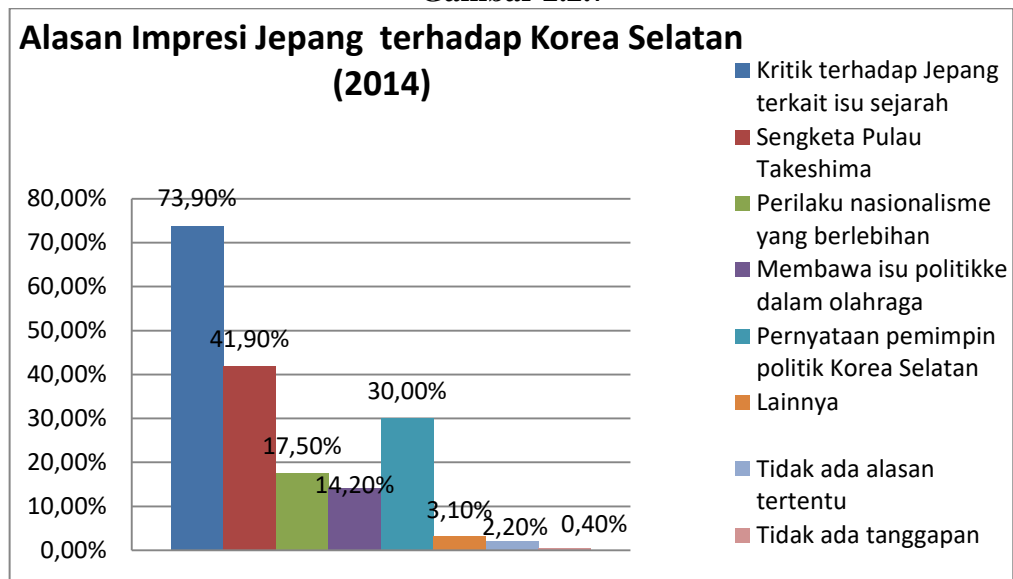
Gambar 2.2.4 dan 2.2.5 menunjukkan bahwa di tahun 2013 dan 2014, persentase responden Jepang yang memiliki pandangan negatif terhadap Korea Selatan meningkat dari 37,3 % menjadi 54,4%, dengan presentase responden yang memiliki pandangan positif menurun dari 31,1% menjadi 20,5%. Menurunnya presentase impresi positif antar satu sama lain ini senada dengan survey yang terjadi di Korea Selatan yang telah dikemukakan pada gambar 2.2.1.

Gambar 2.2.6



Sumber: The 1st Japan-South Korea Joint Opinion Poll (The Genron NPO, 2013)

Gambar 2.2.7



Sumber: *The 2nd Joint Korea-Japan Public Opinion Poll 2014 (The Genron NPO & EAI, 2014)*

Pada gambar 2.2.6 dan 2.2.7 dapat dilihat pula bahwa alasan utama Jepang memiliki impresi negatif terhadap Korea Selatan di karenakan kritik yang diajukan terus menerus oleh Korea Selatan kepada Jepang terkait isu sejarah antar kedua negara tersebut, persentasenya juga meningkat dari 55,80% menjadi 73,90%. Meskipun begitu berbeda dengan polling yang dilakukan di Korea Selatan, ketika ditanyakan mengenai “apa yang terpikir pertama kali oleh responden di Jepang ketika mendengar kata Korea Selatan?”, hanya 31% menjawab isu “*comfort women*” dengan responden lainnya mengatakan jawaban yang lebih variatif, seperti *K-drama* atau *K-pop* (The Genron NPO & EAI, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi negatif Jepang terhadap Korea Selatan pun hanya merupakan respon dari kritik terus-menerus yang diajukan Korea Selatan terhadap Jepang terkait isu sejarah. Akan tetapi, masyarakat Jepang sendiri tidak

menganggap isu “*comfort women*” sebagai isu yang sangat penting yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan.

Ketidakepekaan masyarakat Jepang terkait isu “*comfort women*” merupakan salah satu dampak distorsi terhadap fakta sejarah yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Hal ini salah satunya dapat di lihat pada kuil Yasukuni dan Museum Yushukan yang banyak menampilkan narasi sejarah yang membenarkan perbuatan Jepang di Asia pada masa Perang Dunia 1931-1945 (Kingston, 2013, hal. 184). Bagi Jepang, kuil Yasukuni dan Museum Yushukan merupakan simbol pembenaran bagi persepsi Jepang, bahwa perang suci Jepang di Asia atas nama kaisar Showa (Hirohito) merupakan perang yang adil dan memiliki tujuan yang mulia, yaitu membebaskan Asia dari penindasan bangsa barat (Kingston, 2013). Dalam museum ini kita tidak akan menemukan bukti-bukti kekejaman Jepang di masa lalu seperti sistem “*comfort women*”, *rape of Nanking*, pengeboman udara terhadap warga sipil tanpa pandang bulu, kekejaman Jepang terhadap tawanan perang, dan unit 731 (Kingston, 2013, hal. 188). Sekarang ini pun bentuk kerjasama Jepang dalam membantu negara lain cenderung mengenai hal-hal seperti memberikan solusi terhadap isu lingkungan, teknologi, atau memberikan keuntungan terhadap kawasan dalam menikmati kesuksesan ekonomi Jepang (Glosserman & Synder, 2015, hal. 53). Sedikit sekali ketertarikan untuk melakukan mediasi atau menyelesaikan permasalahan dengan negara lain (Glosserman & Synder, 2015, hal. 53) .

2.3 Isu “*comfort women*” sebagai pemicu ketegangan antara Jepang dan Korea Selatan

Isu “*comfort women*” pertama kali mendapat perhatian rakyat Korea Selatan di tahun 1990, ketika Komite Penasehat Anggaran di Jepang mengeluarkan pernyataan sebagai berikut (AWF, 2003):

“After listening to elderly people and piecing together what they say, it appears that the wartime comfort women were taken by private entrepreneurs to different places, going where the military went. Frankly, even if one were to conduct an inquiry into the circumstances, it would not yield any result.”

Rakyat Korea Selatan sangat tersinggung dengan pernyataan tersebut. Bagi Korea Selatan, pernyataan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa Jepang tidak mengakui akan keterlibatannya terhadap isu “*comfort women*” di masa lalu dan menolak untuk bertanggung jawab maupun melakukan investigasi lebih lanjut terkait isu tersebut. Sebelumnya, isu “*comfort women*” memang kurang mendapatkan perhatian karena pemerintah Jepang telah menghancurkan bukti-bukti terkait keterlibatan Jepang dalam isu “*comfort women*”, karena dinilai dapat mencemari kehormatan tentara Jepang dan menimbulkan kemarahan warga Jepang apabila mengetahui anggaran nasional digunakan untuk mendanai sistem “*comfort women*” (Koh, 2007, hal. 10). Selain itu, korban “*comfort women*” di Korea Selatan juga belum berani untuk muncul ke publik dan menceritakan pengalamannya, karena “*comfort women*” dianggap sebagai aib yang sangat memalukan (Koh, 2007, hal. 11). Akan tetapi, Mengikuti tren era demokratisasi yang terjadi di Korea Selatan, korban “*comfort women*” akhirnya memberikan pernyataannya ke publik untuk pertama kali pada tahun 1991. (Center for Research

on Globalization, 2015). Pengakuan inilah yang kemudian semakin mendorong terangkatnya isu “*comfort women*”, di tambah lagi dengan penemuan yang ditemukan oleh Yoshiaki Yoshimi pada tahun 1992 mengenai dokumen-dokumen yang membuktikan keterlibatan militer Jepang dalam sistem “*comfort women*” (AWF, 2003).

Dengan berbagai bukti yang muncul dan menyudutkan Jepang terkait isu “*comfort women*”, pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan yang disebut sebagai “*Kono Statement*” pada tahun 1993. Dalam “*Kono Statement*” pemerintah Jepang mengakui adanya keterlibatan militer Jepang dalam sistem “*comfort women*” dan mencantumkan permintaan maaf sebagai berikut:

“... Comfort stations were operated in response to the request of the military authorities of the day. The then Japanese military was, directly or indirectly, involved in the establishment and management of the comfort stations and the transfer of comfort women. The recruitment of the comfort women was conducted mainly by private recruiters who acted in response to the request of the military. The Government study has revealed that in many cases they were recruited against their own will, through coaxing, coercion, etc., and that, at times, administrative/military personnel directly took part in the recruitments. They lived in misery at comfort stations under a coercive atmosphere.... Undeniably, this was an act, with the involvement of the military authorities of the day, that severely injured the honor and dignity of many women. The Government of Japan would like to take this opportunity once again to extend its sincere apologies and remorse to all those, irrespective of place of origin, who suffered immeasurable pain and incurable physical and psychological wounds as comfort women.”

Akan tetapi pengakuan ini dianggap tidak cukup layak terutama dengan tidak dicantumkan berbagai informasi hasil investigasi mengenai “*comfort women*”, seperti jumlah korban maupun detail mengenai penjelasan kekejaman yang dilakukan Jepang dalam sistem “*comfort women*”, yang merupakan tuntutan korban “*comfort women*”. Selain itu, ada kelompok konservatif di Jepang yang

menentang adanya statement tersebut, karena dianggap sebagai pencemaran terhadap identitas nasional Jepang, sehingga pengakuan yang dikeluarkan pemerintah ini cenderung tidak konsisten (Kingston, 2013).

Dengan meningkatnya kecaman internasional terhadap isu “*comfort women*”, Perdana Menteri Jepang membentuk sebuah *project* yaitu “*Asia Peace, Friendship, and Exchange Initiative (Asian Women’s Fund)*” yang merupakan penggalangan dana untuk kompensasi terhadap korban “*comfort women*”, sehingga warga negara Jepang, perusahaan, dan organisasi dapat memberikan donasinya untuk korban “*comfort women*” (Koh, 2007, hal. 12). AWF merupakan penggalangan dana swadaya dan bukan merupakan badan pemerintah, sehingga Jepang dapat menghindari kewajiban hukum dalam memberikan kompensasi terhadap korban “*comfort women*” (Koh, 2007, hal. 13). Pada akhirnya, AWF hanya memberikan kompensasi material terhadap “*comfort women*” tanpa adanya pengakuan negara mengenai kejahatan yang telah dilakukan, maupun permintaan maaf yang tegas, melainkan hanya melalui surat yang dituliskan Perdana Menteri Jepang bagi mereka yang bersedia menerima kompensasi tersebut (Kingston, 2013, hal. 200). Permintaan maaf ini juga mengundang kontroversi karena Perdana Menteri Jepang menggunakan kata “*owabi*” yang secara harfiah menyerupai kata “permisi” dalam bahasa Jepang dan biasa dipakai misalnya apabila seseorang menabrak orang lain di kereta (Koh, 2007, hal. 13). Ketidaksiwaan Jepang inilah yang menyebabkan banyaknya korban “*comfort women*” tidak mau menerima uang tersebut (Kingston, 2013, hal. 200). Oleh

karena itu, konflik isu “*comfort women*” antara Jepang dan Korea Selatan pun terus bergulir.

Dalam mengemukakan kekecewaan dan tuntutan terhadap pemerintah Jepang, para korban “*comfort women*” di Korea Selatan mengadakan demonstrasi mingguan. Demonstrasi ini telah dilaksanakan sejak Januari 1992 setiap hari Rabu di depan kedutaan Jepang di Korea Selatan (www.koreatimes.co.kr , 18/11/16). Demonstrasi pertama di tahun 1992 ini dilakukan untuk menuntut Jepang untuk memberikan tanda penghormatan atau *memorial* bagi para korban “*comfort women*”. Demonstrasi ini tetap dilakukan setiap minggunya demi menuntut permohonan maaf Jepang serta pertanggung jawaban terhadap korban “*comfort women*” di Korea Selatan, bahkan hingga tercatat dalam the Guinness Book of Records sebagai demonstrasi terpanjang yang terus-menerus dilakukan terkait sebuah isu (www.humanrightskorea.org, 19/11/2016).

Pada demonstrasi yang ke-900, Januari 2010, salah seorang korban “*comfort women*” Yi Ok Sun mengemukakan kekecewaannya terhadap Jepang (www.huffingtonpost.com, 19/11/16):

“Even today the Japanese government keeps denying its involvement. It’s just common sense. When someone commits a crime, they should apologize for it if they are human beings. But the Japanese government keeps denying their involvement in setting up this system. I think it’s really unfair, and I feel very wronged.”

Setahun setelahnya, untuk memperingati demonstrasi yang telah dilakukan selama 1000 kali, di tahun 2011, para demonstran mendirikan sebuah patung perempuan yang merupakan simbol dari “*comfort women*” di depan kedutaan Jepang di Korea Selatan (www.huffingtonpost.com , 20/11/2016). Bagi para protestan, pembuatan

patung ini bertujuan supaya diplomat Jepang dapat menyadari apa yang telah Jepang lakukan kepada korban “*comfort women*” tiap kali mereka memasuki dan meninggalkan kedutaan (www.nytimes.com, 20/11/2016). Jepang sangat menyesalkan pemerintah Korea Selatan yang membiarkan hal ini terjadi dan menyatakan protesnya terhadap hal tersebut. Protes Jepang terhadap dibangunnya patung tersebut didasarkan pada Vienna Convention on Diplomatic Protocol article 22:

- (1) *The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission*
- (2) *The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.*

Meskipun pemerintah Jepang telah menyampaikan ketidaksetujuannya yang beralasan, dengan dorongan publik yang sangat kuat, pemerintah Korea Selatan cenderung tidak dapat berbuat apa-apa dengan berdirinya patung ini.